

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang terjadi secara terus-menerus tentu akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek. Di Indonesia sendiri pemanfaatan perkembangan teknologi tersebut dilaksanakan dalam banyak bidang termasuk bidang perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan bidang lainnya. Adanya pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Pemanfaatan teknologi turut diimplementasikan pada proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik yang dilakukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Bank Indonesia dan Lembaga Negara lainnya yang mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (5) yang menetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri (independen).

Secara umum teknis pelaksanaan pemeriksaan di BPK dibagi ke dalam dua kegiatan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan dan pengakhiran pemeriksaan. Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan adalah kegiatan yang dilaksanakan ketika tim pemeriksa berada di lapangan. Kegiatan pekerjaan pemeriksaan dimulai dari komunikasi awal dan diakhiri dengan komunikasi akhir dengan pihak Entitas yang diperiksa, sedangkan kegiatan pengakhiran pemeriksaan adalah kegiatan setelah tim kembali dari lapangan. Kegiatan pengakhiran pemeriksaan antara lain, melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan dan mempertanggungjawabkan administrasi pemeriksaan.

Penerapan konsep pemeriksaan secara manual ini merupakan konsep yang sangat membutuhkan interaksi langsung dari pihak pemeriksa (BPK RI) dengan Entitas yang diperiksa, dimana pemeriksaan ini dilakukan pada lingkungan Entitas tersebut. Konsep manual ini juga berlaku pada proses pemerolehan data-data Entitas beserta bukti-bukti terkait, dimana pihak pemeriksa harus memperoleh data Entitas yang diperiksa dengan cara melakukan interaksi secara langsung. BPK berada di Ibukota negara dan memiliki kantor perwakilan di tiap-tiap provinsi. Pada perkembangannya, jumlah Entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara dari tahun ke tahun semakin bertambah. Banyaknya Entitas yang harus diperiksa mulai dari pusat hingga daerah sedangkan jumlah sumber daya auditor yang terbatas serta adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksaan merupakan persoalan yang dihadapi BPK.

Sumber daya manusia yang terbatas dan banyaknya entitas yang harus diperiksa, maka penerapan konsep manual pada pemeriksaan oleh BPK RI memerlukan sebuah inovasi. Oleh karena itu, BPK RI mencoba mengembangkan sistem dengan berbasis teknologi informasi yang disebut *e-audit* (elektronik audit) sebagai upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pemeriksaan. Sistem *e-audit* sendiri telah diperkenalkan sejak tahun 2010 dan telah mendapat dukungan yang besar dari pihak pemerintahan pada pertemuan antara Presiden dan Kepala Lembaga Negara di Bogor pada tanggal 21 Januari 2010. Sedangkan BPK RI perwakilan Jawa Timur sendiri telah menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 19 Mei 2011. Dalam penerapan sistem baru yang berbasis teknologi informasi ini tentu BPK RI perlu beberapa waktu untuk melakukan uji coba dan penerapan secara bertahap hingga saat pelaksanaan secara penuh, yang direncanakan pada tahun 2015.

Proses penerapan dimulai dengan dilakukannya *piloting* yaitu uji coba penerapan sistem *e-audit* pada beberapa Entitas secara bertahap. Hal ini dilakukan mulai dari skala kecil dan akhirnya meluas. Dengan adanya sistem *piloting* ini, penerapan sistem *e-audit* oleh BPK dapat dikembangkan sekaligus dievaluasi saat menghadapi kendala sehingga sistem *e-audit* akan siap untuk diterapkan secara penuh. Proses *piloting* pertama kali diterapkan pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penerapan proses *piloting* pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Pertama, sejak reformasi tata kelola keuangan negara, pelaporan keuangan merupakan proses bisnis yang sudah cukup dipahami oleh Entitas pemerintah baik kementerian

maupun lembaga di pusat maupun Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di daerah. (Warta BPK edisi 07 Juli, 2011)

Kedua, penyusunan laporan keuangan sudah diatur dengan mekanisme yang terstruktur dan didukung dengan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi informasi, seperti Sistem Akuntansi Internal (SAI) di tingkat kementerian/lembaga, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di tingkat Pemerintah Pusat, dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di tingkat pemerintahan daerah, serta Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terintegrasi dengan *Enterprise Resource Planning* (ERP) atau sistem informasi dan teknologi informasi perusahaan pada BUMN. (Warta BPK edisi 07 Juli, 2011)

Ketiga, penerapan sistem informasi tersebut menghasilkan struktur data yang relatif seragam sehingga memudahkan proses *link and match* data. Keempat, sebagian besar data yang diatur secara eksplisit dalam MoU tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data merupakan data yang dihasilkan dalam rangka pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Proses pengatura data tersebut akan dapat menjamin ketersediaan data yang dibutuhkan dalam rangka *piloting* sistem *e-audit*. (Warta BPK edisi 07 Juli, 2011)

Keuntungan yang diharapkan dari penerapan *e-audit* adalah efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan dapat ditingkatkan karena ruang lingkup pemeriksaan dapat diperluas dan pemeriksaan dapat berfokus pada beberapa daerah yang berisiko. Untuk menghasilkan tata kelola keuangan negara yang baik, *e-audit* dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

E-audit juga dapat mejadi sistem peringatan dini dalam pengelolaan keuangan negara yang baik (Hadi Purnomo, 2011).

Hadi Purnomo (2011) juga menambahkan, “Melalui *e-audit*, BPK bisa memeriksa secara populasi sehingga mencakup hampir seluruh jumlah keuangan negara. Melalui sistem ini juga, BPK bisa mengakses dan menguji rekening semua rekening pengelola dan penanggung jawab keuangan negara. BPK juga bisa menelusuri transaksi yang dilakukan pengelola keuangan negara untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran jumlahnya, kelengkapan rinciannya, dan kejelasan sumber keuangannya”.

Uji coba dengan cara *piloting* ini secara terus menerus dikembangkan mulai tahun 2011 hingga tahun 2014, *piloting* ini tentu diharapkan dapat mendukung pemeriksaan yang riil pada ketiga jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, dan Pemeriksaan Kinerja. Namun, hingga saat ini perkembangan mengenai sistem *e-audit* sendiri belum terlalu dipublikasikan. Terlebih lagi, terdapat beberapa kendala-kendala menuju proses penerapan secara penuh pada tahun ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sistem *e-audit* oleh BPK RI terutama perwakilan Jawa Timur, mengingat BPK RI perwakilan Jawa Timur merupakan kantor perwakilan dengan Entitas terbanyak yaitu 39 Entitas terperiksa. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari penerapan sistem *e-audit* yang direncanakan telah terlaksana secara penuh ditahun 2015 ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini agar dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Penerapan Sistem *E-audit* Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem *e-audit* pada BPK RI perwakilan Jawa Timur?
2. Apa saja kendala yang muncul dari penerapan sistem *e-audit* pada BPK RI perwakilan Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan sistem *e-audit* pada BPK RI perwakilan Jawa Timur;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dari penerapan sistem *e-audit* pada BPK RI perwakilan Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan peneliti mengenai adanya sistem *e-audit* yang diterpkan oleh BPK RI.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai sistem *e-audit*.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa-mahasiswi, terutama bagi konsentrasi audit.

1.5. **Sistematika Penelitian Skripsi**

Penjelasan mengenai penelitian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian-bagian, yang mana meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori yang digubakan pada penelitian ini, kerangka pemikiran dari penelitian ini serta hipotesis yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, batasa-batasan pada penelitian, identifikasi variabel, metode pengumpulan data dan teknik analisi data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran subyek penelitian, analisis data serta pembahsan peneliti mengenai hasil analisi data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

